



## KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

### SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

NOMOR : SDM-SM.03.03-01044

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nama                    | : Miftahuddin Irvani, S.H.                            |
| NIP                     | : 199502282019031010                                  |
| Tempat/ Tanggal Lahir   | : Semarang, 28 Februari 1995                          |
| Pangkat/ Golongan Ruang | : Penata muda/ IIIa                                   |
| Jabatan                 | : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama |
| Instansi/ Unit Kerja    | : Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RI      |
| Kualifikasi             | : <b>BAIK SEKALI</b>                                  |

telah memenuhi Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 5 Mei 2025 di Depok yang meliputi 368 (tiga ratus enam puluh delapan) jam pelajaran.

Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dhahana Putra

Depok, 5 Mei 2025

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

## DAFTAR MATA PELATIHAN

### I. Materi Pokok Dasar

1. Dinamika Kelompok;
2. Perkembangan Tuntutan Kompetensi dan Profesi Aparatur Sipil Negara;
3. Hal Ikhwal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Interumen Hukum lainnya;
4. Pola Karier Jabatan Fungsional Perancang;
5. Rincian Kegiatan dan Angka Kredit Perancang; dan
6. Etika Perancang.

### II. Materi Kelompok Inti

1. Pengantar Filsafat Hukum;
2. Teori Hukum;
3. Konsensus Kebangsaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pengantar Sistem Hukum dan Politik Hukum Nasional;
5. Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Metodologi Penormaan;
7. Pengantar Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyusunan Naskah Akademik;
10. Pemahaman terhadap Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Proses Penyusunan Peraturan Daerah;
12. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
13. Bahasa Peraturan Perundang-undangan;
14. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
15. Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
16. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan;

17. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
18. Legislasi Semu dan Penetapan;
19. Pengujian Peraturan Perundang-undangan;
20. Pendapat Hukum;
21. Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
22. Bimbingan Penyusunan Tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang Sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang Materi Muatannya bersifat Teknis dan Prosedural;
23. Kunjungan Praktik Kerja Perancang;
24. Bimbingan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
25. Seminar Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

### III. Materi Kelompok Penunjang

1. Masalah Aktual dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum lainnya;
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Komunikasi, Negosiasi, dan Aktualisasi Diri; dan
4. Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

### IV. Aktualisasi

1. Ujian

Depok, 5 Mei 2025

Kepala Pusat Pengembangan  
Pelatihan Fungsional,

Tejo Harwanto